

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR ISTILAH.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
INTISARI	xx
ABSTRACT	xxi
SURAT KETERANGAN PENYUNTINGAN BAHASA	xxii
STATEMENT LETTER	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Motivasi Penelitian	9
1.6 Kontribusi Penelitian.....	9
1.6.1 Kontribusi Akademis	9
1.6.2 Kontribusi Praktis	9
1.6.3 Kontribusi Kebijakan.....	10
1.7 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian	10
1.7.1 Ruang Lingkup	10
1.7.2 Batasan Penelitian.....	10
1.8 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 <i>Stewardship Theory</i>	12
2.1.1 Dimensi <i>Stewardship Theory</i>	13

2.1.1.1 Faktor Psikologis (<i>Psychological Factors</i>).....	14
2.1.1.2 Faktor Situasional (<i>Situational Factors</i>).....	15
2.2 Tata Kelola (<i>Good Governance</i>).....	16
2.2.1 Definisi Tata Kelola	16
2.2.2 Prinsip-Prinsip Tata Kelola	17
2.2.2.1 Transparansi (<i>Transparency</i>)	17
2.2.2.1.1 Indikator Transparansi	18
2.2.2.2 Akuntabilitas (<i>Accountability</i>)	18
2.2.2.2.1 Indikator Akuntabilitas	19
2.2.2.3 Aturan Hukum (<i>Rule of Law</i>).....	19
2.2.2.3.1 Indikator Aturan Hukum.....	20
2.2.2.4 Responsibilitas (<i>Responsiveness</i>)	21
2.2.2.4.1 Indikator Responsibilitas	21
2.2.2.5 Efektivitas (<i>Effectiveness</i>)	21
2.2.2.5.1 Indikator Efektivitas	22
2.2.2.6 Efisiensi (<i>Efficiency</i>)	22
2.2.2.6.1 Indikator Efisiensi	23
2.2.2.7 Demokrasi (<i>Democracy</i>)	23
2.2.2.7.1 Indikator Demokrasi	24
2.2.2.8 Tidak Memihak (<i>Impartiality</i>).....	24
2.2.2.8.1 Indikator Tidak Memihak	25
2.2.2.9 Kewajaran (<i>Fairness</i>)	26
2.2.2.9.1 Indikator Kewajaran	26
2.3 Pengendalian Internal.....	27
2.3.1 Sistem Pengendalian Mutu	28
2.3.2 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	29
2.4 Jaminan Mutu Kualitas Pemeriksaan	31
2.5 Penelitian Terdahulu.....	32
2.6 Rerangka Pemikiran	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Desain Penelitian.....	40
3.2 Subjek dan Objek Penelitian	40
3.3 Sumber Data	40
3.4 Teknik Pengumpulan Data	42
3.4.1 Wawancara	42
3.4.2 Analisis Dokumen	44
3.5 Teknik Keterpercayaan Data (<i>Data Trustworthiness</i>)	46
3.5.1 Validitas.....	46
3.5.2 Reliabilitas	47
3.6 Teknik Analisis Data	47
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Profil Tata Kelola Pemeriksaan BPK	53
4.1.1 Organisasi Pemeriksaan	53

4.1.2 Siklus Pemeriksaan	54
4.1.2.1 Perencanaan Pemeriksaan	54
4.1.2.2 Pelaksanaan Pemeriksaan	56
4.1.2.3 Pelaporan Pemeriksaan	57
4.2 Temuan.....	59
4.2.1 Permasalahan Tingkat Konsistensi, Tingkat Akurasi Nilai, dan Kesalahan Lainnya dalam Laporan Hasil Pemeriksaan	59
4.2.2 Penerapan Prinsip Tata Kelola Pemeriksaan BPK	61
4.2.2.1 Prinsip Transparansi.....	61
4.2.2.1.1 Penerapan Prinsip Transparansi pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.....	61
4.2.2.1.1.1 Menyediakan Informasi Proses Penyusunan Peraturan dan Kebijakan.....	62
4.2.2.1.1.2 Mengumumkan secara Terbuka Peraturan Perundang- Undangan dan Kebijakan.....	63
4.2.2.1.1.3 Menyediakan Informasi yang Mudah Diakses dan Dipahami	64
4.2.2.1.1.4 Menyediakan Informasi Penyusunan Renstra, Program Kerja, dan Anggaran, serta Pelaksanaannya	65
4.2.2.1.1.5 Kelengkapan Penyediaan Informasi	66
4.2.2.1.2 Penerapan Prinsip Transparansi pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	68
4.2.2.1.2.1 Menyediakan Informasi Proses Penyusunan Peraturan dan Kebijakan.....	68
4.2.2.1.2.2 Mengumumkan secara Terbuka Peraturan Perundang- Undangan dan Kebijakan.....	69
4.2.2.1.2.3 Menyediakan Informasi yang Mudah Diakses dan Dipahami	70
4.2.2.1.2.4 Menyediakan Informasi Penyusunan Renstra, Program Kerja, dan Anggaran, serta Pelaksanaannya	71
4.2.2.1.2.5 Kelengkapan Penyediaan Informasi	72
4.2.2.2 Prinsip Akuntabilitas.....	75
4.2.2.2.1 Penerapan Prinsip Akuntabilitas pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.....	76
4.2.2.2.1.1 Menetapkan Perincian Fungsi, Tugas, serta Wewenang dan Tanggung Jawab.....	76
4.2.2.2.1.2 Memiliki Ukuran Kinerja dan Memastikan Ketercapaian Kinerja.....	77
4.2.2.2.1.3 Melaksanakan Tugas Secara Jujur dan Memenuhi Prinsip Akuntabilitas.....	78
4.2.2.2.1.4 Pertanggungjawaban Perlu Disampaikan Secara Berkala.	79
4.2.2.2.1.5 Keluhan atau Pengaduan	80
4.2.2.2.1.6 Evaluasi terhadap Kinerja.	81
4.2.2.2.1.7 Diawasi oleh Masyarakat dan Lembaga yang Diberikan Kewenangan.....	82
4.2.2.2.2 Penerapan Prinsip Akuntabilitas pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	85

4.2.2.2.2.1 Menetapkan Perincian Fungsi, Tugas, serta Wewenang dan Tanggung Jawab.....	85
4.2.2.2.2.2 Memiliki Ukuran Kinerja dan Memastikan Ketercapaian Kinerja.....	86
4.2.2.2.2.3 Melaksanakan Tugas Secara Jujur dan Memenuhi Prinsip Akuntabilitas.....	87
4.2.2.2.2.4 Pertanggungjawaban Perlu Disampaikan Secara Berkala.	88
4.2.2.2.2.5 Keluhan atau Pengaduan	89
4.2.2.2.2.6 Evaluasi terhadap Kinerja.....	90
4.2.2.2.2.7 Diawasi oleh Masyarakat dan Lembaga yang Diberikan Kewenangan.....	91
4.2.2.3 Prinsip Aturan Hukum	94
4.2.2.3.1 Penerapan Prinsip Aturan Hukum pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur	95
4.2.2.3.1.1 Penyusunan dan Penetapan Peraturan dan Kebijakan.....	95
4.2.2.3.1.2 Peraturan dan Kebijakan Perlu Mengandung Nilai yang Mendukung Terwujudnya Supremi Hukum.....	96
4.2.2.3.1.3 Menjalankan Tugas dan Kewajiban Secara Profesional, Jujur, dan Taat Asas	97
4.2.2.3.1.4 Memastikan Fungsi Lembaga Hukum, SDM, dan Perangkat Hukum.....	98
4.2.2.3.1.5 Sanksi terhadap Pelanggaran Perundang-Undangan dan Kebijakan	99
4.2.2.3.2 Penerapan Prinsip Aturan Hukum pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	101
4.2.2.3.2.1 Penyusunan dan Penetapan Peraturan dan Kebijakan.....	101
4.2.2.3.2.2 Peraturan dan Kebijakan Perlu Mengandung Nilai yang Mendukung Terwujudnya Supremi Hukum.....	102
4.2.2.3.2.3 Menjalankan Tugas dan Kewajiban Secara Profesional, Jujur, dan Taat Asas	103
4.2.2.3.2.4 Memastikan Fungsi Lembaga Hukum, SDM, dan Perangkat Hukum.....	104
4.2.2.3.2.5 Sanksi terhadap Pelanggaran Perundang-Undangan dan Kebijakan	105
4.2.2.4 Prinsip Responsibilitas	109
4.2.2.4.1 Penerapan Prinsip Responsibilitas pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur	109
4.2.2.4.1.1 Responsibilitas Internal.....	109
4.2.2.4.1.2 Responsibilitas Eksternal.....	111
4.2.2.4.2 Penerapan Prinsip Responsibilitas pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	113
4.2.2.4.2.1 Responsibilitas Internal.....	113
4.2.2.4.2.2 Responsibilitas Eksternal.....	115
4.2.2.5 Prinsip Efektivitas	117

4.2.2.5.1 Penerapan Prinsip Efektivitas pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur	117
4.2.2.5.1.1 Bukti yang Dapat Dipertanggungjawabkan	118
4.2.2.5.1.2 Manfaat dan Biaya	120
4.2.2.5.1.3 Mekanisme Alternatif	121
4.2.2.5.2 Penerapan Prinsip Efektivitas pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	123
4.2.2.5.2.1 Bukti yang Dapat Dipertanggungjawabkan	123
4.2.2.5.2.2 Manfaat dan Biaya	125
4.2.2.5.2.3 Mekanisme Alternatif	126
4.2.2.6 Prinsip Efisiensi	128
4.2.2.6.1 Penerapan Prinsip Efisiensi pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur	128
4.2.2.6.1.1 Melaksanakan Kebijakan atau Perencanaan Dilakukan dengan Tepat	129
4.2.2.6.1.2 Menghasilkan Kembalian yang Optimal.....	131
4.2.2.6.2 Penerapan Prinsip Efisiensi pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	133
4.2.2.6.2.1 Melaksanakan Kebijakan atau Perencanaan Dilakukan dengan Tepat	134
4.2.2.6.2.2 Menghasilkan Kembalian yang Optimal.....	135
4.2.2.7 Prinsip Demokrasi.....	138
4.2.2.7.1 Penerapan Prinsip Demokrasi pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur	138
4.2.2.7.1.1 Dilakukan Secara Bertanggungjawab Berdasarkan Kesadaran dan Pemahaman Politik Masyarakat.	139
4.2.2.7.1.2 Dilakukan atas Dasar Kepentingan Negara atau Masyarakat.....	141
4.2.2.7.1.3 Mampu Mendengar, Memilah, dan Menyalurkan Aspirasi Rakyat dengan Berpegang pada Kepentingan Negara dan Masyarakat.	143
4.2.2.7.1.4 Mengikutsertakan Partisipasi Masyarakat Secara Bertanggung Jawab.	145
4.2.2.7.1.5 Harus Disusun dalam Rangka Mewujudkan Kepentingan Umum.	147
4.2.2.7.1.6 Menerapkan Prinsip Partisipasi Dalam Melaksanakan Fungsi, Tugas, dan Kewenangannya.....	149
4.2.2.7.2 Penerapan Prinsip Demokrasi pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	151
4.2.2.7.2.1 Dilakukan Secara Bertanggungjawab Berdasarkan Kesadaran dan Pemahaman Politik Masyarakat.	151
4.2.2.7.2.2 Dilakukan atas Dasar Kepentingan Negara atau Masyarakat.....	154
4.2.2.7.2.3 Mampu Mendengar, Memilah, dan Menyalurkan Aspirasi Rakyat dengan Berpegang pada Kepentingan Negara dan Masyarakat.	156
4.2.2.7.2.4 Mengikutsertakan Partisipasi Masyarakat Secara Bertanggung Jawab.	159

4.2.2.7.2.5	Harus Disusun dalam Rangka Mewujudkan Kepentingan Umum.	162
4.2.2.7.2.6	Menerapkan Prinsip Partisipasi Dalam Melaksanakan Fungsi, Tugas, dan Kewenangannya.....	164
4.2.2.8	Prinsip Tidak Memihak.....	167
4.2.2.8.1	Penerapan Prinsip Tidak Memihak pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur	168
4.2.2.8.1.1	Memiliki Kewenangan Untuk Menetapkan atau Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan.	168
4.2.2.8.1.2	Melaksanakan Pelayanan dengan Berbasis Kesetaraan.....	170
4.2.2.8.1.3	Standar Pelayanan Berkualitas Disusun Sesuai dengan Sifat dan Jenis Pelayanan	173
4.2.2.8.1.4	Standar Pelayanan yang Berkualitas Diawasi Masyarakat serta Lembaga yang Diberikan Kewenangan Melakukan Pengawasan	175
4.2.2.8.1.5	Menerapkan Kebijakan Rekrutmen dan Karier dalam Lingkungannya Atas Dasar Kesetaraan.	177
4.2.2.8.2	Penerapan Prinsip Tidak Memihak pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	180
4.2.2.8.2.1	Memiliki Kewenangan Untuk Menetapkan atau Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan.	180
4.2.2.8.2.2	Melaksanakan Pelayanan dengan Berbasis Kesetaraan.....	182
4.2.2.8.2.3	Standar Pelayanan Berkualitas Disusun Sesuai dengan Sifat dan Jenis Pelayanan.	185
4.2.2.8.2.4	Standar Pelayanan yang Berkualitas Diawasi Masyarakat serta Lembaga yang Diberikan Kewenangan Melakukan Pengawasan.	187
4.2.2.8.2.5	Menerapkan Kebijakan Rekrutmen dan Karier dalam Lingkungannya Atas Dasar Kesetaraan.	189
4.2.2.9	Prinsip Kewajaran	192
4.2.2.9.1	Penerapan Prinsip Kewajaran pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur	193
4.2.2.9.1.1	Menetapkan atau Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Mengutamakan dan Melindungi Hak-Hak dengan Berbasis Kewajaran..	193
4.2.2.9.1.2	Melaksanakan Pelayanan dengan Berbasis Kewajaran.....	195
4.2.2.9.1.3	Standar Pelayanan yang Berkualitas Disusun Sesuai Sifat dan Jenis Pelayanan.	198
4.2.2.9.1.4	Standar Pelayanan yang Berkualitas Diawasi Masyarakat serta Lembaga yang Diberikan Kewenangan Melakukan Pengawasan.	200
4.2.2.9.2	Penerapan Prinsip Kewajaran pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	203

4.2.2.9.1.1	Menetapkan atau Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Mengutamakan Melindungi Hak-Hak dengan Berbasis Kewajaran.....	203
4.2.2.9.1.2	Melaksanakan Pelayanan dengan Berbasis Kewajaran.....	205
4.2.2.9.1.3	Standar Pelayanan yang Berkualitas Disusun Sesuai Sifat dan Jenis Pelayanan.	207
4.2.2.9.1.4	Standar Pelayanan yang Berkualitas Diawasi Masyarakat serta Lembaga yang Diberikan Kewenangan Melakukan Pengawasan.	209
4.2.3	Identifikasi Perspektif Tim Pemeriksa dalam Menghadapi Permasalahan Tata Kelola Pemeriksaan (Inkonsistensi, Ketidakakuratan, dan Kesalahan Lainnya) dalam LHP dengan Pendekatan <i>Stewardship Theory</i>	212
4.2.2.1	Identifikasi Perspektif Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur	213
4.2.2.1	Identifikasi Perspektif Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	216
4.3	Pembahasan	220
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		225
5.1	Simpulan	225
5.2	Kontribusi Praktis Penelitian	226
5.3	Keterbasan	226
5.4	Saran	227
DAFTAR PUSTAKA		228
LAMPIRAN.....		233